



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai bagian integral dari akuntabilitas kinerja program. Sehingga pengukuran dan penilaian terhadap output kegiatan dan outcome program pembangunan dengan menggunakan alat ukur yang tepat, jelas, terukur merupakan langkah strategis membangun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan dalam upaya perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa mendatang, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

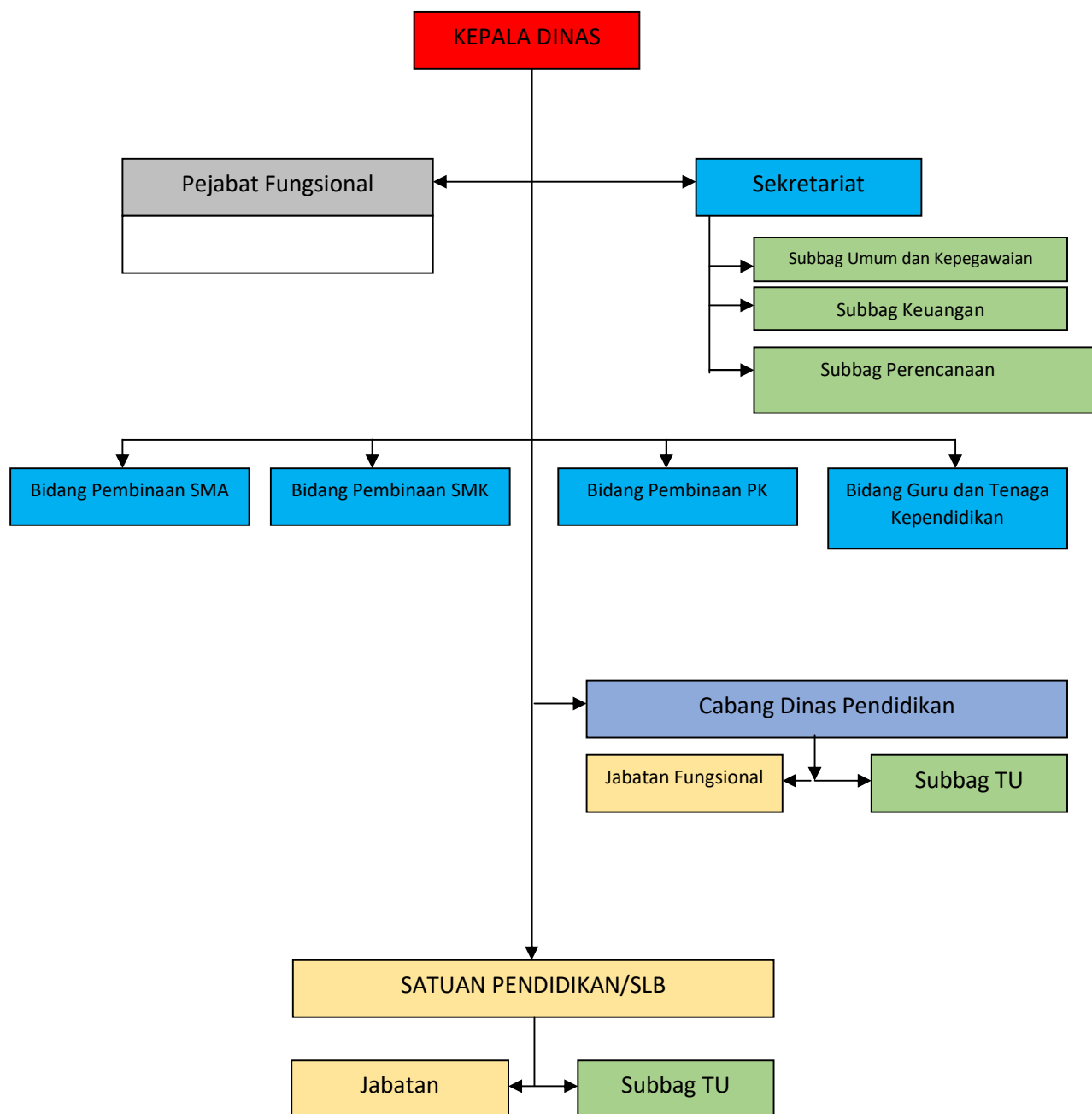


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I.3. Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pendidikan memiliki struktur organisasi yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I.4. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 5 (lima) kewenangan pada urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun ruang lingkup kewenangan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan dalam hal:

- Pengelolaan Pendidikan Menengah
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

b. Ruang Lingkup Kurikulum

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup kurikulum memiliki kewenangan dalam hal:

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Menengah.
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Khusus.

c. Ruang Lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kewenangan dalam hal Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

d. Ruang Lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan memiliki kewenangan dalam hal:

- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Untuk melaksanakan kewenangan ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Membantu Gubernur untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut adalah uraian struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kepala Dinas Pendidikan. Uraian tugas dan fungsi sekretariat sebagai berikut:

Tugas:

Membantu Kepala Dinas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada sekretariat terdapat 3 unit tugas, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan. Adapun uraian dari unit tugas tersebut yaitu sebagai berikut:

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- B. Sub Bagian Keuangan
- C. Sub Bagian Perencanaan

2. BIDANG PEMBINAAN SMA

Bidang Pembinaan SMA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. BIDANG PEMBINAAN SMK

Bidang Pembinaan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMK memiliki tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyusunan bahan



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus memiliki tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan layanan pendidikan khusus di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan adalah membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penataan dan pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Mengingat rentang kendali yang sangat luas serta dengan mempertimbangkan letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan, maka terdapat beberapa Cabang Dinas Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun cabang dinas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. **Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka adalah membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat adalah membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan yaitu membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur adalah membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berupa satuan pendidikan. Satuan Pendidikan tersebut berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu juga terdapat UPTD yang mengelola Pendidikan Khusus terpadu yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Satuan pendidikan khusus yang dikelola oleh Sekolah Luar Biasa bentuk Taman kanak-kanan luar biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).

I.5. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

I.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat 4.528 (empat ribu lima ratus dua puluh delapan) orang pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang berstatus PNS maupun Non PNS. Untuk yang berstatus PNS seluruhnya berjumlah 2.004 (dua ribu empat) orang dan yang non PNS seluruhnya berjumlah 2.524 (dua ribu lima ratus dua puluh empat) orang yang tersebar pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.

- a. Pada Kantor Dinas Pendidikan terdapat 111 (seratus sebelas) orang pegawai.

Tabel 1.1
Pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan (Orang)					
		S2	S1	D3	SM	SMP	Total
1	Pembina Utama Muda (IV C)	2					2
2	Pembina Tk. I (IV B)	1	3				4
3	Pembina (IV A)	3	4				7
4	Penata Tk. I (III D)	4	10	1			15
5	Penata (III C)		13				13
6	Penata Muda Tk. I (III B)	1	16				17
7	Penata Muda (III A)		7	2			9
8	Pengatur Tk. I (II D)			6	1		7
9	Pengatur (II C)			4	2		6
10	Pengatur Muda Tk. I (II B)				3		3
11	Pengatur Muda (II A)				1		1
14	Non PNS (Honorar)		9	2	16		27
Jumlah		11	62	15	23	0	111

- b. Pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan sebagian besar merupakan tenaga fungsional pengawas sekolah. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Pada UPTD Satuan Pendidikan terdapat 4.396 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam) orang guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB di lingkungan satuan pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel berikut menunjukkan jumlah pegawai di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.2
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan pada setiap
Jenjang di UPTD Satuan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai								
		PNS			Non PNS			Total		
		L	P	T	L	P	T	L	P	T
SMA	Guru	346	503	849	324	363	687	670	866	1536
	Tenaga Kependidikan	59	42	101	267	225	492	326	267	593
	Total 1	405	545	950	591	588	1179	996	1133	2129
SMK	Guru	414	405	819	359	372	731	773	777	1550
	Tenaga Kependidikan	32	28	60	260	205	465	292	233	525
	Total 2	446	433	879	619	577	1196	1065	1010	2071
SLB	Guru	27	63	90	19	40	59	46	103	149



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Tenaga Kependidikan	0	1	1	18	24	42	18	25	43
	Total 3	27	64	91	37	64	101	64	131	195
DPK	Guru	6	12	18	0	0	0	6	12	18
	Tenaga Kependidikan									
	Total 4	6	12	18	0	0	0	6	12	18
Total		884	1052	1936	1247	1229	2476	2131	2281	4412

I.5.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kantor yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang. Kantor berlantai 2 dan terdapat 1 (satu) ruang pertemuan kecil dan 1 (satu) ruang pertemuan besar. Seluruh ruangan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilengkapi dengan Air Conditioner (AC) dan kamera pengaman (CCTV). Untuk mendukung kerja pegawai, di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Belitung dilengkapi dengan jaringan internet beserta komputer dan printer, lemari arsip dan filing cabinet, meja dan kursi kerja, meubelair tamu serta meja dan kursi rapat.

Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

Hingga saat ini pada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan 44 (empat puluh empat) SMA Negeri, 36 (tiga puluh enam) SMK dan 7 (tujuh) SLB. Selain itu, juga terdapat 25 (dua puluh lima) SMA Swasta, 20 (dua puluh) SMK swasta dan 2 (dua) SLB swasta. Semua satuan pendidikan ini tersebar merata di 7 Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel berikut menunjukkan jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.3
Jumlah SMA, SMK dan SLB

No	Wilayah	SMA			SMK			SLB			TOTAL
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	
1	Kab. Bangka	17	10	7	11	5	6	2	1	1	30
2	Kab. Bangka Barat	10	6	4	8	4	4	1	1	0	19
3	Kab. Belitung	6	4	2	7	5	2	1	1	0	14
4	Kab. Belitung Timur	7	5	2	7	4	3	1	1	0	15
5	Kab. Bangka Selatan	10	8	2	7	6	1	1	1	0	18
6	Kab. Bangka Tengah	7	6	1	5	5	0	1	1	0	13
7	Kota Pangkalpinang	10	4	6	9	5	4	2	1	1	21
	Total	67	43	24	54	34	20	9	7	2	130

I.6. Sumber Pendanaan Tahun 2019

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat alokasi dana sebesar Rp. 587.463.680.922,40 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 288.902.309.020,40 dan Belanja Langsung sejumlah 298.561.371.902,00 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan10 (sepuluh) program sebagai berikut.

Tabel 1.4
Alokasi Belanja per Program Dinas Pendidikan Tahun 2019

No.	Program	BTL	BL	TOTAL
1.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	-	25.379.572.075,00	25.379.572.075,00
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	-	29.194.004.500,00	29.194.004.500,00
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	-	44.836.815.424,00	44.836.815.424,00
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan	-	5.902.154.500,00	5.902.154.500,00

	Pendidikan Khusus			
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	-	2.615.988.343,00	2.615.988.343,00
6.	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	-	36.315.130.000,00	36.315.130.000,00
7.	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	-	14.278.763.000,00	14.278.763.000,00
8.	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	-	34.415.382.700,00	34.415.382.700,00
9.	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	-	23.494.749.500,00	23.494.749.500,00
10.	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	-	82.128.811.860,00	82.128.811.860,00
	JUMLAH	288.902.309.020,40	298.561.371.902,00	587.463.680.922,40

Selain APBD, Dinas Pendidikan juga mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejumlah Rp 4.169.175.000,00. Dengan demikian anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut Tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5
Alokasi APBD dan APBN pada Dinas Pendidikan Tahun 2019

SUMBER	JUMLAH (Rp)	PERSENTASE
APBD	587.463.680.922,40	99,30
APBN	4.169.175.000	0,70
TOTAL	591.632.855.922,40	100

I.7. Isu Strategis Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Terdapat sejumlah isu strategis dalam urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya akses layanan pendidikan menengah untuk menampung lulusan SMP serta akses layanan bagi anak berkebutuhan khusus di SLB.
2. Masih ada lulusan SMP yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
3. Masih rendahnya mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
4. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar.
5. Belum relevannya program keahlian pada pendidikan vokasi dengan potensi daerah dan kebutuhan tenaga kerja.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****II.1. Perencanaan Strategis****II.1.1 Visi dan Misi**

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu:

- 1) *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang didalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
- 2) *Sejahtera*; menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
- 3) *Maju*; adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan



melalui peningkatan kualitas SDM dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

- 4) *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
- 5) *Efisien dan Cepat* dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan *e-Government* (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) *Teknologi* dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

Adapun misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017–2022, yaitu:

1) Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pernyataan misi ini mengandung makna: a. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. b. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2) Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.

Pernyataan misi ini mengandung makna: a. Infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. b. Konektivitas daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3) Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.

Pernyataan misi ini mengandung makna: a. Sumber daya manusia adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. b. Unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata Lama Sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

4) Meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna: a. Kesehatan Masyarakat adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.

Pernyataan misi ini mengandung makna: a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. b. Pembangunan demokrasi adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6) Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Pernyataan misi ini mengandung makna: a. Pengendalian bencana adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana. b. Kualitas lingkungan hidup adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Untuk mencapai visi terdapat 4 (empat) misi yang terkait dengan pembangunan Bidang Pendidikan yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Peningkatan sumberdaya manusia unggul dan handal;
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Renstra) dengan Tujuan dan Sasaran pada RJPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022.

Tabel 2.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD dengan
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan

RPJMD				Renstra		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan		Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP
		Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan		Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP
		Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)		Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP
Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Pendapatan perkapita Masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan		Peningkatan Akses Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	% Masyarakat tidak mampu bersekolah di Pendidikan menengah
Meningkatnya Pendidikan	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata	Meningkatnya kesempatan pendidikan	Angka harapan lama sekolah		Peningkatan Akses Pendidikan	APK Dikmen

RPJMD				Renstra		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Masyarakat	lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	bagi masyarakat	(Tahun)	Meningkatnya kesempatan Pendidikan bagi masyarakat	Menengah	
					Peningkatan Akses Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Khusus
					Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	Persentase SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat		Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat		Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi dan kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan

baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Setelah melalui beberapa tahapan analisis penentuan alternatif strategi dan kebijakan, dapat dirumuskan strategi dan kebijakan umum untuk setiap sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesempatan Pendidikan bagi masyarakat	Peningkatan Akses Pendidikan SMA dan SMK	Meningkatkan Akses Pendidikan SMA dan SMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) 2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang lulusan SMP tidak tertampung. 3. Penambahan Jumlah GTK sesuai dengan analisis kebutuhan GTK. 4. Perbaikan Sistem Penerimaan Siswa Baru 5. Pembangunan Asrama Siswa. 6. Penerapan Pendidikan keluarga di satuan pendidikan. 7. Revitalisasi Guru BK
	Peningkatan Akses Pendidikan Khusus	Meningkatkan Akses Pendidikan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) 2. Penambahan Jumlah GTK sesuai dengan analisis kebutuhan GTK. 3. Pembangunan Asrama Siswa. 4. Penerapan Pendidikan keluarga di satuan pendidikan. 5. Revitalisasi Guru BK 6. Penerapan Pendidikan Inklusi 7. Optimalisasi Fungsi PLA 8. Mendeteksi dini siswa berkebutuhan khusus
	Peningkatan Akses Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	Penyediaan biaya pribadi bagi siswa tidak mampu	Pemberian Beasiswa bagi siswa tidak mampu



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Meningkatkan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesejahteraan guru. 2. Pemberian penghargaan dan perlindungan bagi guru 3. Pemenuhan kebutuhan Sarpras sesuai SNP 4. Rehabilitasi sarpras yang rusak. 5. Peningkatan Kompetensi Guru. 6. Pemberian Beasiswa kualifikasi bagi GTK 7. Pelaksanaan sertifikasi Kepsek dan Calon Kepsek. 8. Revitalisasi peran pengawas sekolah. 9. Pelaksanaan lomba-lomba siswa dan GTK. 10. Penyediaan beasiswa prestasi bagi siswa berprestasi 11. Pelatihan kurikulum bagi guru 12. Revitalisasi PLA
	Peningkatan relevansi pendidikan SMK	Meningkatkan Relevansi Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan LSP SMK ✓ Pemenuhan Sarana Produktif SMK ✓ Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan ✓ Penyesuaian Program Keahlian SMK dengan sektor unggulan daerah dan kondisi wilayah ✓ Kerjasama dengan DUDI serta Instansi Pemerintah Lainnya
	Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan layanan administrasi pendidikan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan biaya administrasi perkantoran. ✓ Peningkatan sarpras aparatur ✓ Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan. ✓ Pelaksanaan penyusunan laporan dan Monev. ✓ Peningkatan disiplin pegawai. ✓ Peningkatan Kompetensi Pegawai ✓ Optimalisasi peran Cabang Dinas Pendidikan ✓ Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dengan kab/kota dan kementerian teknis terkait. ✓ Penyediaan beasiswa bagi lulusan pendidikan menengah dan mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu. ✓ Penyediaan bantuan keuangan kepada kab/kota sesuai kemampuan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			keuangan daerah.

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Pendidikan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Program Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD. Rencana program prioritas beserta indikator outcome dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan menjadi 10 Program Perangkat Daerah dan 206 kegiatan di Dinas Pendidikan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan atas strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tabel 2.3
Program dan Jumlah Kegiatan Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	11 Kegiatan
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	5 Kegiatan
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Kejuruan	5 Kegiatan
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	5 Kegiatan
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	3 Kegiatan
6.	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	26 Kegiatan
7.	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	13 Kegiatan

8	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	29 Kegiatan
9.	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	21 Kegiatan
10.	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	88 Kegiatan
Total Kegiatan		206 Kegiatan

Terdapat keterkaitan antara indikator kinerja Dinas Pendidikan dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Tabel 2.4 menampilkan penjabaran indikator kinerja Dinas Pendidikan dengan target capaian selama 5 (lima) tahun.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	APK Pendidikan Menengah*) (%)	69,3	76,49	85,77	89,67	96,10	100,85	100,85
2	APK SLB (%)	37	37	38	39	41	42	42
3	% SMA/SMK Terakreditasi A	32,50	35,77	40	46,83%	53,17	59,52	59,52
4	Rata-rata Nilai UN SMA dan SMK	6,2	6,3	6,5	6,8	7,0	7,3	7,3
5	% SLB Terakreditasi A	0	30	50	80	100	100	100
6	% Lulusan SMK yang Bekerja atau melanjutkan	20	40	50	60	70	75	80

Keterangan :

APK Pendidikan menengah tidak termasuk program Paket C.

II.2 Perjanjian Kinerja

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja dapat diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada awal tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 oleh kepala Perangkat Daerah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	DEFINI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Menengah APK Pendidikan Khusus	85,77% 68,43%	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.	Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	% SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A	44,03%	TERLAMPIR
3.	Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP	200 orang	
4	Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BB	

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis maka Dinas Pendidikan melaksanakan program dengan anggaran sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	25.379.572.075,00	APBD
2. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	29.194.004.500,00	APBD
3. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Kejuruan	44.836.815.424,00	APBD
4. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	5.902.154.500,00	APBD
5. Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	2.615.988.343,00	APBD
6. Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	36.315.130.000,00	APBD
7. Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	14.278.763.000,00	APBD
8. Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	34.415.382.700,00	APBD
9. Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan	23.494.749.500,00	APBD



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Belitung Timur		
10. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	82.128.811.860,00	DAK
TOTAL	298.561.371.902,00	

II.3 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Adapun alokasi anggaran tahun 2019 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2019 (Anggaran Setelah Perubahan APBD)

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	14.506.740.000,00	5
2.	Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	258.475.059.827,00	86,57
3.	Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	200.000.000,00	0,10
4.	Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	25.379.572.075,00	8,33
	TOTAL	298.561.371.902,00	100

Anggaran sejumlah Rp. 276.222.503.175,00 yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja merupakan anggaran APBD sebelum perubahan. Selanjutnya total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD menjadi Rp. 298.561.371.902,00.

Alokasi anggaran terbesar adalah untuk pemenuhan sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB. Hal ini dikarenakan permasalahan utama dalam Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah belum semua sekolah jenjang pendidikan menengah telah terakreditasi A. Sebagai



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

solusinya maka semua program melalui kegiatan yang berkenaan memberikan kontribusi dalam mendukung upaya percepatan akreditasi sekolah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA**III.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019, terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2019. Untuk memahami arti pencapaian dari indikator kinerja tersebut, berikut gambaran singkat indikator yang digunakan:

- Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat Pendidikan. Sesuai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, maka APK yang dijadikan sasaran kinerja adalah APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Adapun komponen dalam penilaian akreditasi mencakup 9 (sembilan) komponen sekolah, yaitu kurikulum dan proses belajar mengajar, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, serta lingkungan dan kultur sekolah. Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur: a) pengajuan permohonan dari sekolah, b) evaluasi diri oleh sekolah, c) pengolahan hasil evaluasi diri, d) visitasi oleh asesor, e) penetapan hasil akreditasi, dan f) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

- Sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Salah satu upaya peningkatan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah dengan pemberian sertifikat kompetensi lulusan SMK. Sertifikat kompetensi tersebut untuk menjamin bahwa lulusan SMK mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan industri. Sertifikat kompetensi juga sebagai sarana branding lulusan SMK. Siswa yang mendapatkan sertifikat kompetensi diharapkan akan lebih mudah diterima bekerja di industri yang sesuai. Agar bisa mendapatkan sertifikat kompetensi maka siswa harus mengikuti uji kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP- P1). Untuk itu maka pemerintah provinsi memiliki program untuk mendorong agar SMK mendirikan LSP-P1.

Selanjutnya dalam pengukuran kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kategorisasi/predikat capaian kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	ST
2	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3	$66 \leq 75$	Sedang	S
4	$51 \leq 65$	Rendah	R
5	≤ 50	Sangat Rendah	SR

III.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Menengah (%)	85,77	87,11	101,56	Sangat Tinggi
	APK Pendidikan Khusus (%)	68,43	85,34	124,71	Sangat Tinggi
Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	Persentase SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A (%)	44,03	43,38	98,52	Sangat Tinggi
Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP (orang)	200	367	183,5	Sangat Tinggi
Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BB	BB	100	Sangat Tinggi

- Pada sasaran strategis Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus terdapat 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja APK Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus diperoleh realisasi yang sudah diatas target yang ditetapkan dengan capaian realisasinya adalah sangat tinggi yaitu 101,56% dan 124,71%.
- Pada sasaran strategis Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB, realisasi indikator % SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A masih dibawah target akan tetapi capaian predikat adalah Sangat Tinggi yaitu 98,52%.

- Untuk sasaran Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP dapat direalisasikan diatas target, dan capaian kinerja sasaran ini adalah Sangat Tinggi yaitu 183,5%.
- Untuk sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator dapat direalisasikan sesuai target yaitu BB. Dengan demikian capaian kinerja sasaran ini adalah Sangat Tinggi

III.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019.

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Menengah	76,49	82,21	107,48	85,77	87,11	101,56
	APK Pendidikan Khusus	61,24	52,68	86,02	68,43	85,34	124,71
Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	% SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A	40,15	40,15	100	44,03	43,38	98,52
Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP	100	100	100	200	367	183,5
Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BB	BB	100	BB	BB	100

Membandingkan capaian kinerja tahun lalu (bahkan beberapa tahun sebelumnya) dengan capaian kinerja tahun 2019, dapat menjadi bahan evaluasi mengenai bagaimana program/kegiatan

yang dilaksanakan dalam tahun tertentu dapat menjadi pendorong atau penghambat pencapaian kinerja. Data capaian 2019 dibandingkan dengan realisasi kinerja 2018. Dengan data 2018 demikian maka tingkat capaian kinerja 2019 adalah:

- Pada sasaran Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, diperoleh APK Pendidikan Menengah sedikit lebih rendah daripada APK Pendidikan Menengah Tahun 2018 sedangkan APK Pendidikan Khusus capaian kinerja lebih tinggi dari Tahun 2018.
- Pada sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB mencapai kinerja sedikit lebih rendah pada tahun 2019 .
- Pada sasaran strategis Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP mencapai kinerja sangat progresif pada tahun 2019.
- Pada sasaran strategis peningkatan layanan administrasi pemerintahan untuk tahun 2019 juga masih sama dengan tahun 2018, Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bernilai BB.

III.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.4
Capaian kinerja Akhir Renstra per Tahun 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2022)	REALISASI s.d. TAHUN 2019	%
Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Menengah	92,56	87,11	94,11
	APK Pendidikan Khusus	36,00	85,34	237,05

Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	% SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A (%)	62,22	43,38	69,72
Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP (orang)	500	367	73,4
Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	A	BB	90

- Sasaran Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sampai dengan tahun 2019 telah menunjukkan hasil yang baik, dimana capaian indikator APK Pendidikan Menengah telah mencapai 94,11 dari target akhir Renstra dan indikator APK Pendidikan Khusus bahkan telah melebihi target akhir Renstra. Capaian ini selain menggambarkan keberhasilan program dan kegiatan yang mendukung sasaran, juga dapat dijadikan evaluasi dalam penentuan target selanjutnya.
- Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB memiliki target terakreditasi A sebesar 62,22 pada tahun 2022 (akhir periode Renstra). Adapun pencapaian s.d. Tahun 2019 baru mencapai 69,72% . Diharapkan target Renstra dapat terealisasi sepenuhnya pada akhir periode renstra.
- Untuk Sasaran strategis jumlah Lulusan SMK yang Disertifikasi oleh BNSP, Pada akhir Renstra ditargetkan sebanyak 500 siswa disertifikasi oleh BNSP. Sampai dengan Tahun 2019 capaian kinerja baru mencapai 73,4 % dari target Renstra.
- Pada sasaran strategis peningkatan layanan administrasi pemerintahan untuk tahun 2019 juga masih sama dengan tahun 2018, Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bernilai BB.

III.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standard nasional.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi APK SMA/Sederajat antara Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	NASIONAL 2019	REALISASI TAHUN 2019	%
APK SMA/ sederajat	83,98	87,11	103,72

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Angka Partisipasi Kasar SMA/ sederajat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah diatas rata-rata nasional.

III.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi atas Pencapaian Kinerja Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA	ANALISIS
APK Pendidikan Menengah (%)	85,77	87,11	101,56	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung semua pemangku kepentingan dalam dunia Pendidikan, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha dan masyarakat. Semua elemen menunjukkan komitmen dan kontribusi positif dalam pencapaian realisasi sasaran ini.
APK Pendidikan Khusus (%)	68,43	62,85	91,85	Sangat Tinggi	
Persentase SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A (%)	44,03	43,38	98,52	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini sangat didukung oleh pengerahan sumberdaya, dimana semua program di Dinas Pendidikan berkontribusi dalam peningkatan mutu SMA, SMK dan SLB yang ditandai dengan perolehan akreditasi A.
Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP (orang)	200	367	183,5	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung komitmen pimpinan dan sumberdaya terutama anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi	BB	BB	100	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung komitmen pimpinan.

Kepulauan Bangka Belitung					
------------------------------	--	--	--	--	--

III.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dari sisi sumber daya anggaran dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB dan peningkatan layanan administrasi pemerintahan cukup efisien dengan capaian kinerja yang baik.

Pada indikator Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Peningkatan Relevansi pendidikan vokasi, sumber daya anggaran juga digunakan secara efisien.

Berikut tabel predikat capaian kinerja dan predikat capaian anggaran Dinas Pendidikan tahun 2019 dengan menggunakan skala nilai sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Terhadap Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PREDIKAT CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT CAPAIAN ANGGARAN
Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Menengah (%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	APK Pendidikan Khusus (%)	Tinggi	
Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	% SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A	Sangat Tinggi	Tinggi
Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sangat Tinggi	Tinggi

III.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk melihat program/kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam setiap sasaran strategis, maka dipetakan sebagaimana Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Pemetaan Program/Kegiatan Sesuai Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Peningkatan Sarana/ Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Peningkatan sarana/ prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus dan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis
2.	Meningkatnya SMA, SMK, SLB terakreditasi A	Persentase SMA, SMK, SLB terakreditasi A	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)
				Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA
				Pengembangan Kurikulum SMA
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK PENUGASAN)
				Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK
				Pengembangan Kurikulum SMK
				Pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus
			Program	Peningkatan Mutu PTK

			Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	SMA
				Peningkatan Mutu PTK SMK
				Peningkatan Mutu PTK SLB
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA, SMK,SLB Negeri se-wilayah Pangkalpinang dan Bangka
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA, SMK,SLB Negeri se-wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA, SMK,SLB Negeri se-wilayah Bangka Barat
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA, SMK,SLB Negeri se-wilayah Belitung dan Belitung Timur
			Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Pengelolaan Dana BOS di SM dan SLB Negeri se-Bangka Belitung (DAK Non Fisik)
3	Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK
				Pengembangan Kurikulum SMK
				Pengembangan Kurikulum SMK
4	Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Pelayanan Administrasi Perkantoran

		Kepulauan Bangka Belitung		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				Peningkatan Disiplin Aparatur
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
				Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi
				Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi
				Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional
				Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah

Setelah mengetahui program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis, kemudian dicermati hal-hal yang menjadi penentu keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Sasaran Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Tingkat keterlayanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih dibawah 95 persen sehingga untuk Pendidikan menengah dilakukan pemberian motivasi bagi siswa, penambahan daya tampung (ruang kelas baru atau unit sekolah baru), dan pemenuhan sarana prasarana sekolah sesuai Standar Nasional. Untuk Pendidikan khusus juga dilakukan penambahan ruang kelas baru, pembangunan asrama siswa, penerapan Pendidikan inklusi dan deteksi dini siswa berkebutuhan khusus.

- Sasaran Meningkatnya SMA, SMK, SLB terakreditasi A.

Berangkat dari data bahwa belum semua sekolah menengah di Provinsi Bangka Belitung terakreditasi B maka menjadi komitmen semua pihak terkait untuk memperoleh bahkan meningkatkan status akreditasi sekolah mencakup semua komponen penilaian mulai dari kurikulum dan proses belajar mengajar, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, serta lingkungan dan kultur sekolah. Faktor penentu keberhasilan sasaran ini terutama karena didukung komitmen dan anggaran yang mencukupi.

III.1.8 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.9

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Realisasi
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	BB	BB
		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100	100
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)	100	100



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	100	100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)	100	100
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target di atas 90% (laporan)	6	6
Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	Terseleksinya anggota tim lomba Siswa dan PTK Tk. Provinsi (tim)	10	10
Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi	Lulusan sekolah menengah yang tidak mampu dan/atau berprestasi menerima beasiswa (orang)	550	550
Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	Jenis Kegiatan Siswa dan PTK Tk. Nasional dilaksanakan di Prov. Kep. Babel. (jenis)	1	1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85% (dokumen)	2	2
Rekonsiliasi keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah	Jumlah triwulan Rekonsiliasi keuangan	4	4
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas-	Persentase SMA terakreditasi A (Persen)	42,42	61,4



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (Persen)	100	100
		Rata-rata nilai UN SMA (point)	6,5	5,3
		APK SMA, (Persen)	38,88	33,53
	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	Jumlah RKB SMA Terbangun (ruang)	2	2
		Tersediany Meubelair SMA (unit)	150	150
		Pagar Sekolah Terbangun (sekolah)	4	4
		Lab SMA Terbangun (ruang)	2	2
		Tersedianya Peralatan Lab SMA (paket)	65	65
		Ruang SMA yang direhabilitasi (paket)	6	6
	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	Terlaksananya Pendidikan Karakter Siswa SMA (siswa)	271	271
		Terlaksananya Lomba-lomba siswa SMA (jenis)	9	9
		Terlaksananya Kegiatan Kesiswaan di SMA (sekolah)	67	67
	Pengembangan Kurikulum SMA	SMA melaksanakan pendidikan karakter (sekolah)	67	67
		SMA melaksanakan UNBK (sekolah)	67	67
		Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum (sekolah)	67	67
	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa (siswa)	2485	2.485
	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	Tersedianya peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesenian, sarana seni budaya dan terbangunnya rumah dinas guru beserta perabotnya (paket)	48	48



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		Terbangunnya ruang laboratorium IPA beserta perabotnya (ruang)	2	2
		Terbangunnya ruang kelas baru beserta perabotannya (ruang)	8	8
		Terlaksananya rehabilitasi ruang sekolah (ruang)	28	28
		Terbangunnya toilet/jamban siswa/guru beserta sanitasinya (unit)	8	8
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-	APK SMK (Persen)	38,38	53,58
		Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (Persen)	100	100
		Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal (Persen)	100	100
		Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A (Persen)	100	42,85
		Persentase SMK Kelautan dan perikanan Terkreditasi I A (Persen)	100	0
		Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan Terkreditasi A (Persen)	100	100
		Persentase SMK Pertanian Terkreditasi A (Persen)	100	25
		Rata-rata nilai UN SMK (Poin)	6,5	5



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Tersedianya Peralatan Praktek Siswa (paket)	15	15
		Tersedianya Meubelair SMK (set)	15	15
		Sekolah yang siap diakreditasi (%)	100	100
		Terlaksananya Rehabilitasi SMK (paket)	20	20
		Tersedianya Bengkel Produktif SMK (unit)	2	2
		Terbangunnya RPS SMK (ruang)	7	7
		Terbangunnya RKB SMK (ruang)	10	10
		Terlaksananya Gebyar SMK (kali)	1	1
		Terlaksananya Revitalisasi Prodi SMK (sekolah)	57	57
	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	Terlaksananya pembinaan kesiswaan SMK (sekolah)	57	57
		Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SMK (jenis)	3	3
		Sekolah melaksanakan pendidikan karakter (sekolah)	57	57
	Pengembangan Kurikulum SMK	SMK memiliki TUK (sekolah)	15	12
		Tersedianya Bank Soal Penilaian SMK (dokumen)	1	1
		Tersedianya analisis instrumen kurikulum SMK (dokumen)	1	1
		Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK (sekolah)	57	57
		SMK melaksanakan UNBK (sekolah)	57	57
		Tersedianya Asesor (orang)	30	30
	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiayai (siswa)	1809	1.145
	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	Tersedianya peralatan Praktik Siswa (%)	100	100



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		Ruang Praktik Siswa (ruang)	54	54
		WC/Kamar Mandi Siswa (paket)	16	16
		Terlaksananya Manajemen DAK (ruang)	7	7
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-	APK SLB (Persen)	26,21	85,34
		Persentase SLB terakreditasi A (Persen)	100	30,7
	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	tersedia pagar, mushola, mobil operasional	4	4
	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya lomba-lomba siswa dan GTK SLB (jenis)	3	3
		Terbinanya kegiatan kesiswaan di SLB (sekolah)	9	9
	Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006 (sekolah)	9	9
		Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga (sekolah)	9	9
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	Terlaksananya pelayanan Pusat Layanan Autis (bulan) (bulan)	12	12
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	Tersedianya sarana prasarana SLB (paket)	24	24
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4, (Persen)	97	91,26
		Persentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)	40	60,76



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

		Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50 (Persen)	90	81,89
	Peningkatan Mutu PTK SMA	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih (orang)	150	150
		Jumlah Guru SMA menerima Beasiswa S1 dan S2 (orang)	8	8
		jumlah guru SMA menerima beasiswa PPG (orang)	15	15
		Tersedianya analisis kebutuhan Guru SMA (dokumen)	1	1
	Peningkatan Mutu PTK SMK	Tersedianya analisis kebutuhan Guru SMK (dokumen)	1	1
		jumlah guru SMK menerima beasiswa PPG (orang)	15	15
		Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih (orang)	150	150
		Jumlah Guru SMK menerima Beasiswa S1 dan S2 (orang)	2	2



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Peningkatan Mutu PTK SLB	Jumlah analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SLB (dokumen)	1	1
		Jumlah Terlatihnya Guru Sekolah Inklusi (orang)	50	20
		Jumlah Guru SLB menerima Beasiswa S1 (orang)	2	-
		Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB Terlatih (orang)	150	130
	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS (Persen)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100

	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Paritiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sada, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100	100



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Keberbakatan Olahraga	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	100
	Pengelolaan Dana BOS Afirmasi	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	-
	Pengelolaan Dana Bos Kinerja	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (%)	100	-
	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka (Persen)	79,29	79,29
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Jumlah sekolah terlayani (Sekolah) (sekolah)	26	26
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani (siswa)	797	864



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 2 Pangkalpinang terlayani (siswa)	1500	1.549
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani (siswa)	593	759
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani (siswa)	518	616
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani (siswa)	372	329
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani (siswa)	797	946
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 2 Pangkalpinang terlayani (siswa)	743	851
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani (siswa)	827	899
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 4 Pangkalpinang terlayani (siswa)	631	684
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani (siswa)	260	237
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Sungailiat terlayani (siswa)	1082	1.044
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat, Bangka terlayani (siswa)	691	655
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 mendo Barat, Bangka terlayani (siswa)	321	270
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Belinyu, Bangka terlayani (siswa)	364	406
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Bakam, Sungailia terlayani (siswa)	281	356
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 bakam, kabupaten bangka terlayani (siswa)	281	262



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 belinyu, kabupaten bangka terlayani (siswa)	514	515
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 mendobarat, kabupaten bangka terlayani (siswa)	520	528
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 2 mendobarat, kabupaten bangka terlayani (siswa)	207	247
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 merawang, kabupaten bangka terlayani (siswa)	448	443
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 pemali, kabupaten bangka terlayani (siswa)	800	838
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 puding besar, kabupaten bangka terlayani (siswa)	521	449
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 riau silip, riau silip terlayani (siswa)	338	395
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 sungailiat, kabupaten bangka terlayani (siswa)	889	907
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 2 puding besar, kabupaten bangka terlayani (siswa)	160	129
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Jumlah siswa SLB N Sungailiat terlayani (siswa)	106	122
	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat (Persen)	79,29	79,29
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan	jumlah sekolah terlayani (sekolah)	12	12

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 mentok, bangka barat terlayani (siswa)	697	737
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 kelapa, bangka barat terlayani (siswa)	586	562
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 parittiga, bangka barat terlayani (siswa)	639	714
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 tempilang, bangka barat terlayani (siswa)	332	270
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 simpang teritip, bangka barat terlayani (siswa)	128	58
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 jebus, kabupaten bangka barat terlayani (siswa)	626	645
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 kelapa, kabupaten bangka barat terlayani (siswa)	633	614
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 muntok, kabupaten bangka barat terlayani (siswa)	614	690
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 parit tiga, kabupaten bangka barat terlayani (siswa)	439	469
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 simpang teritip, kabupaten bangka barat terlayani (siswa)	623	617
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 tempilang, kabupaten bangka barat terlayani (siswa)	374	383
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	jumlah siswa SLB N Muntok, terlayani (siswa)	85	74

Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan (Persen)	79,29	79,29
Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	jumlah sekolah terlayani (sekolah)	28	27
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	jumlah siswa smk n 1 koba, terlayani (siswa)	697	475
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 2 Koba, bangka tengah terlayani (siswa)	770	785
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 1 Simpang katis, bangka tengah terlayani (siswa)	792	763
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan baru, bangka tengah terlayani (siswa)	900	844
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 1 Sungai selan, bangka tengah terlayani (siswa)	255	242
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Koba, bangka tengah terlayani (siswa)	694	665
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Lubuk besar, bangka tengah terlayani (siswa)	454	476
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Namang, bangka tengah terlayani (siswa)	449	421
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan baru, bangka tengah terlayani (siswa)	499	514



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Sungai selan, bangka tengah terlayani (siswa)	264	247
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah			
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	jumlah siswa SMA Laskar Pelangi terlayani (siswa)	96	24
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	jumlah siswa SLB N Koba, bangka tengah terlayani (siswa)	70	80
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Toboali, bangka selatan terlayani (siswa)	787	723
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Payung, bangka selatan terlayani (siswa)	345	331
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Pulau besar, bangka selatan terlayani (siswa)	121	89
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Tukak sadai, bangka selatan terlayani (siswa)	345	313
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Simpangrimba, bangka selatan terlayani (siswa)	126	94
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Air gegas, bangka selatan terlayani (siswa)	406	374
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Air gegas, bangka selatan terlayani (siswa)	614	582
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Lepar pongok, bangka selatan terlayani (siswa)	270	238
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 kep.Pongok, bangka selatan terlayani (siswa)	225	193



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Payung, bangka selatan terlayani (siswa)	621	589
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Pulau besar, bangka selatan terlayani (siswa)	177	145
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Simpang rimba, bangka selatan terlayani (siswa)	428	396
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Toboali, bangka selatan terlayani (siswa)	900	874
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 2 Toboali, bangka selatan terlayani (siswa)	510	478
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SLB N Toboali, bangka selatan terlayani (siswa)	90	83
	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur (Persen)	79,29	79,29
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	jumlah sekolah terlayani (sekolah)	21	20
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa)	1100	933
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa)	802	780
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa)	532	504
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Badau, Belitung terlayani (siswa)	523	469



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Selat nasik, Belitung terlayani (siswa)	164	152
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 1 Membalong, Belitung terlayani (siswa)	496	492
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 1 Sijuk, Belitung terlayani (siswa)	507	482
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani (siswa)	723	720
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 2 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani (siswa)	789	741
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SLB N Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani (siswa)	140	136
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani (siswa)	694	675
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	jumlah siswa SMK N 1 Kelapa kampit, Belitung Timur terlayani (siswa)	541	493
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	jumlah siswa SMK N 1 Dendang, Belitung Timur terlayani (siswa)	170	126
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	jumlah siswa SMK N 1 Simpang renggang, Belitung Timur terlayani (siswa)	180	162
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Damar, Belitung Timur terlayani (siswa)	355	319
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Gantung, Belitung Timur terlayani (siswa)	657	643

Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Kelapa kampit, Belitung Timur terlayani (siswa)	466	454
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Manggar, Belitung Timur terlayani (siswa)		
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Simpang pesak, Belitung Timur terlayani (siswa)	493	459
Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SLB N 1 Manggar, Belitung Timur terlayani (siswa)	110	102

A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

- Kegiatan Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi



Gambar:
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD



Gambar:
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP/MTs



Gambar :
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD dan SMP



Gambar:
Lomba OGN Jenjang Guru SD dan SMP

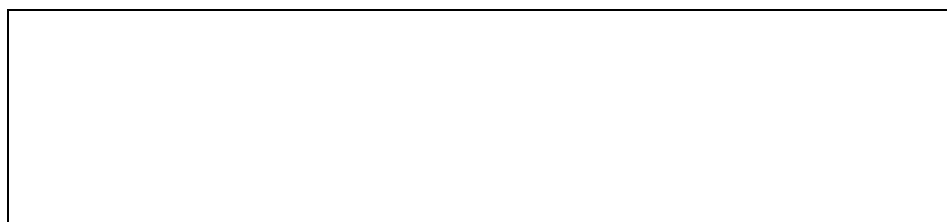
Gambar:
Lomba Kuis Kihajar Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK



Gambar:
Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS

Gambar:
Lomba Gala Siswa

- Kegiatan Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Nasional





Gambar:
Pembukaan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Tingkat Nasional



Gambar:
Malam Penganugerahan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Tingkat Nasional

B. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas.

- Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA

	
<p>Gambar Komputer UNBK</p>	<p>Gambar Komputer UNBK</p>
	
<p>Gambar Rehabilitasi Ruang SMA N 1 Kelapa</p>	<p>Gambar Rehabilitasi Ruang SMA N 1 Kelapa</p>
	
<p>Gambar Rehabilitasi Ruang SMA N 2 Tj Pandan</p>	<p>Gambar Rehabilitasi Ruang SMA N 2 Tj Pandan</p>



Gambar
Rehabilitasi Toilet sma n 1 lubuk besar



Gambar
Rehabilitasi Toilet sma n 1 lubuk besar

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA



Gambar
Lomba Debat Bahasa



Gambar
FLS2N



Gambar
Gebyar Pendidikan



Gambar
Gebyar Pendidikan

	
<p>Gambar O2SN</p>	<p>Gambar OSN</p>

	
<p>Gambar Pramuka</p>	<p>Gambar Lomba Parade Cinta Tanah Air (PCTA)</p>

- Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA


<p>Gambar Kurikulum SMA</p>

- Kegiatan Pemberian Beasiswa Siswa SMA



Gambar
Pemberian Beasiswa Tahfiz

- Kegiatan Pengembangan Sarana Pendidikan SMA(DAK Reguler)



Gambar
Sarana Seni Budaya DAK Fisik SMA

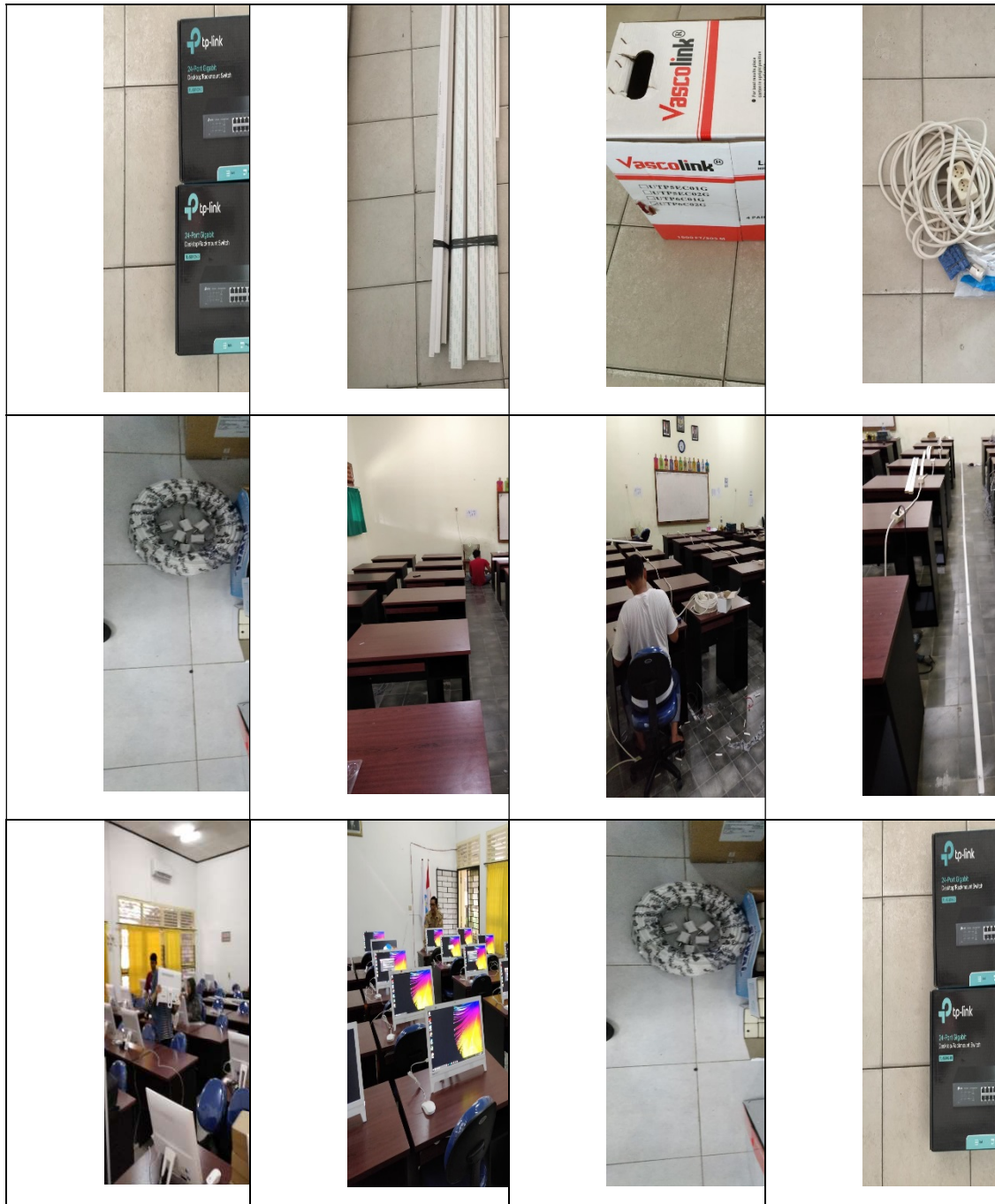


Gambar
Sarana Penjaskes DAK Fisik SMA

C. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Kejuruan.

- Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK

*Dokumentasi Pemasangan Jaringan Komputer UNBK
di SMKN 1 Pangkalpinang dan SMKN 1 Sungailiat*



Dokumentasi Pemasangan Jaringan Komputer UNBK

di SMKN 2 Pangkalpinang



- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK

	
<p>Gambar O2SN SMK</p>	<p>Gambar FLS2N SMK</p>

- Kegiatan Peningkatan Kurikulum SMK

	
<p>Gambar Workshop Penyusunan Bank Soal</p>	<p>Gambar UKK</p>
	
<p>Gambar USBN</p>	<p>Gambar UNBK</p>

- Kegiatan Beasiswa Siswa SMK



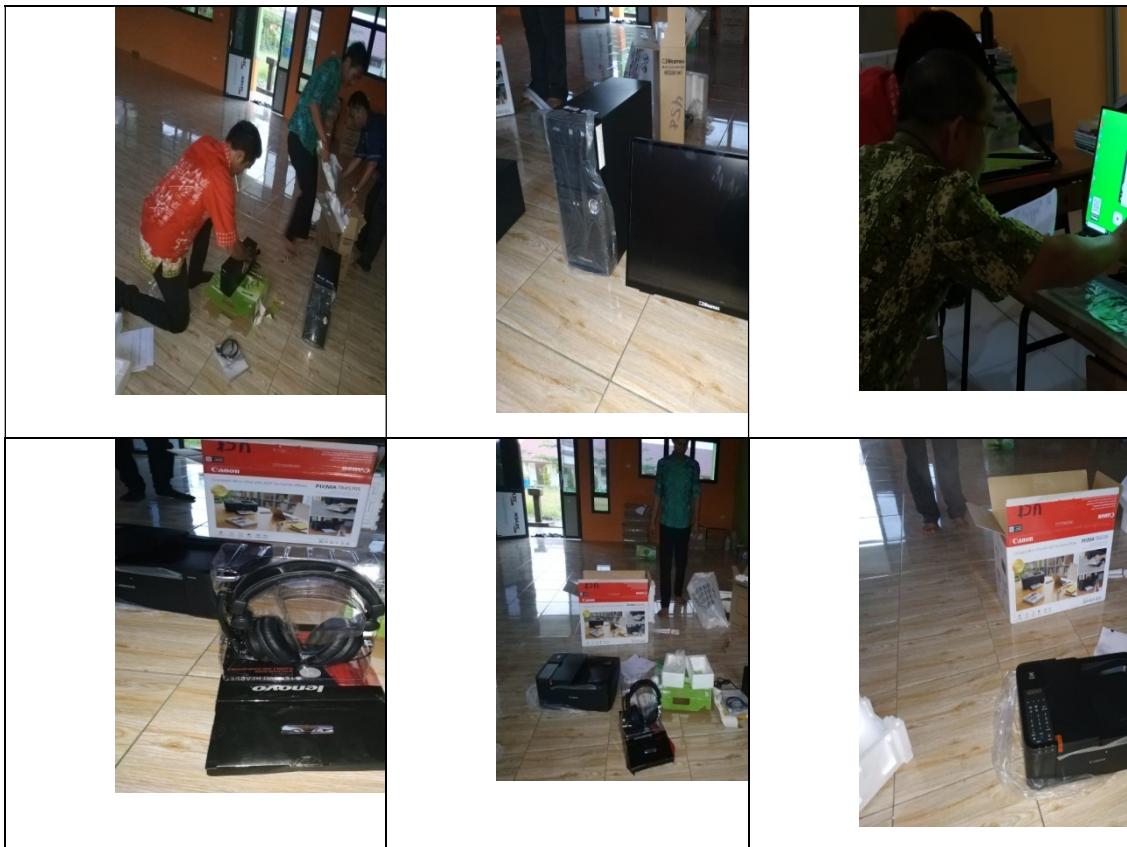
Gambar
Sosialisasi Beasiswa Berkah SMK

- Kegiatan Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)
*Dokumentasi Alat Praktik Utama/Praktik Produksi E-Catalog
di SMKN 1 Parittiga*

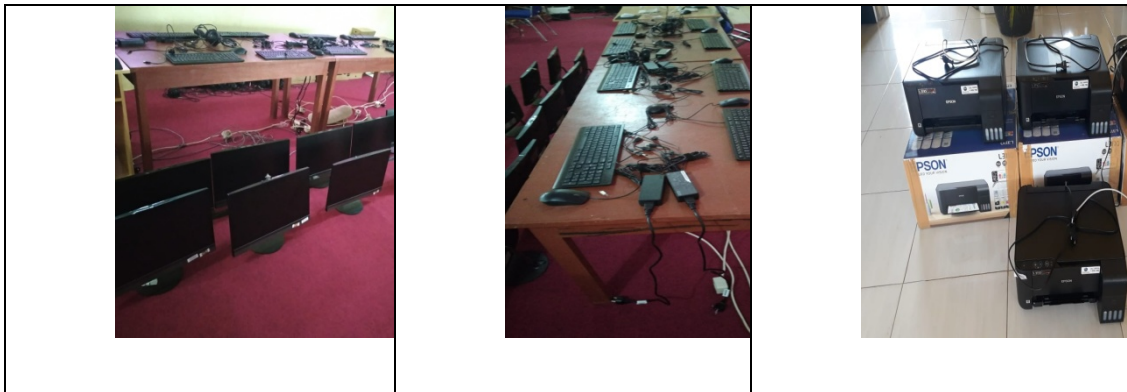




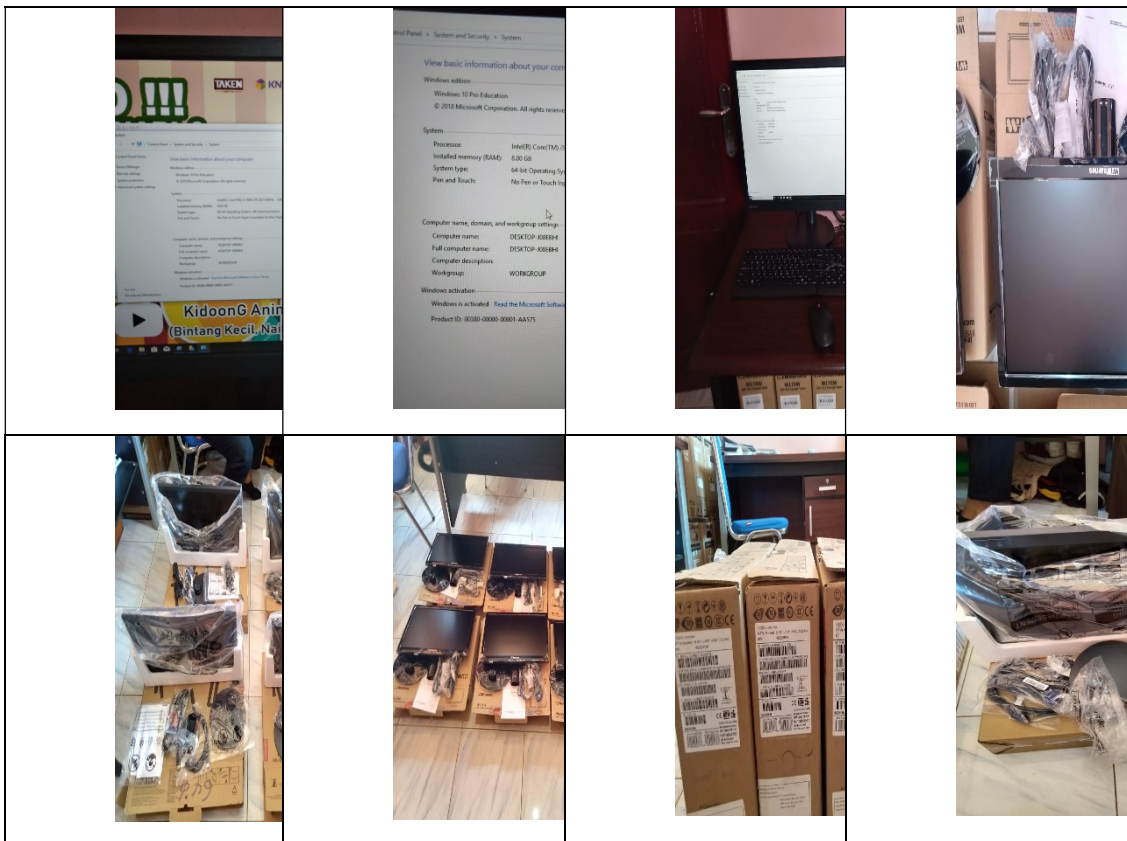
*Dokumentasi Alat Praktik Utama/Praktik Produksi E-Catalog
di SMKN 1 Kelapa*



*Dokumentasi Alat Praktik Utama/Praktik Produksi E-Catalog
di SMKN 1 Sungaiselan*



**Dokumentasi Alat Praktik Utama/Praktik Produksi E-Catalog
di SMKN 1 Simpang Rimba**





D. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus.

- **Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Khusus**



Gambar
Mobil Operasional SLB N
Tanjung Pandan



Gambar
Musholla SLB N Manggar

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesiswaaan Pendidikan Khusus



Gambar
Lomba – Lomba Kegiatan Keberbakatan Siswa Nasional
Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019



Gambar
Lomba – Lomba Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional PKLK Tahun 2019



- Kegiatan Peningkatan Kurikulum Pendidikan Khusus



**KEGIATAN PELATIHAN KEMANDIRIAN VOKASI TAHUN 2019
GRAND VELLA HOTEL , 22-26 APRIL 2019**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



WORKSHOP PENGEMBANGAN BUDI PEKERTI REN'Z HOTEL , 12 - 15 MARET 2019

- Kegiatan Fungsi Pelayanan Autis



Gambar
Outing Class PLA
Eco Park Sungailiat 2019



Gambar
Outing Class PLA
Museum Timah Pangkalpinang 2019



Gambar
Outing Class PLA
Pantai Tongaci Sungailiat 2019



Gambar
Outing Class PLA Memanah



Gambar
Workshop Okupasi Terapi Wicara PLA 2019



Gambar
Home Visit Peserta Didik PLA 2019



Gambar
Study Club Orangtua Peserta Didik PLA 2019



Gambar:
Workshop Peningkatan Keahlian Pegawai PLA 2019

- Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik)



Gambar
Pengadaan Peralatan Pendidikan

Gambar
Pembangunan Gedung SLB

E. Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan.

- Kegiatan Peningkatan Mutu PTK SMA



Gambar 1
Olimpiade Guru Nasional Tingkat
Provinsi 2019

Gambar 2
Olimpiade Guru Nasional Tingkat
Provinsi 2019

	
<p>Gambar 1 Peningkatan Kompetensi Guru SMA Tahun 2019</p>	<p>Gambar 2 Peningkatan Kompetensi Guru SMA Tahun 2019</p>

- Kegiatan Peningkatan Mutu PTK SMK

	
<p>Gambar 1 Seleksi Guru Berprestasi Tk Provinsi 2019</p>	<p>Gambar 2 TC Guru Berprestasi Tk Provinsi 2019</p>
	
<p>Gambar 3 Seleksi Guru Berprestasi Tk Nasional 2019</p>	<p>Gambar 4 Monitoring Siswa S2 Tahun 2019</p>

- Kegiatan Peningkatan Mutu PTK SLB



Gambar
Pemutakhiran Pengetahuan dan Manajemen
SLB



Gambar
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru
PKLK



Gambar
Peningkatan Instruktur Guru PK Keahlian
Tuna Grahita



Gambar
Peningkatan Kompetensi Tenaga
Administrasi Sekolah (TAS)



Gambar
Pelatihan Entrepreneurship bagi Instruktur
PKLK

F. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka.

- Kegiatan Sekolah yang bersumber dari dana APBD dan APBN

APBD :

1. Ulangan semester
2. UNBK
3. Uji kompetensi
4. Praktek farmasi

APBN :

1. Field Trief
2. Parenting Class
3. Peringatan Maulid Nabi
4. Penerimaan Tamu Ambalan Pramuka

Sewa Bus Untuk Field Trip ke cagar budaya dan sejarah

(Mentok Bangka Barat, 02 April 2019)

SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang



Dokumentasi SMK Negeri 5 Pangkalpinang

	
<p>Gambar Praktek Farmasi</p>	<p>Gambar UNBK</p>


<p>Gambar Peringatan Maulid Nabi</p>

Dokumentasi SMK Negeri 2 Pangkalpinang

	
<p>Gambar Peringatan 1 Muharram 1441 H</p>	<p>Gambar Penerimaan Tamu Ambalan Pramuka</p>

Dokumentasi SMK Negeri 3 Pangkalpinang



Gambar
Pramuka Pariwisata

Kegiatan Perkemahan Wira daerah Tahun 2019

SMA Negeri 1 Sungailiat





Field trip SMA N 1 Riau Silip



Dokumentasi SMA Negeri 1 Merawang



Dokumentasi SMA Negeri 1 Bakam

	
<p>Gambar Field trip Wisata Tanjung Pura Dusun Pulau Nangka Bangka Tengah</p>	<p>Gambar Pesantren Kilat</p>

Dokumentasi SMA Negeri 2 Mendo Barat

	
<p>Gambar Field trip Tanjung Kalian Muntok Bangka Barat</p>	<p>Gambar Classmeeting</p>

Dokumentasi SLB Negeri Pangkalpinang (APBD)



Dokumentasi SLB Negeri Pangkalpinang (APBN)



G. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat.

Dokumentasi SLB Negeri Muntok



Dokumentasi SMA Negeri 1 Kelapa

	
<p>Gambar Ulang Tahun SMA Negeri 1 Kelapa</p>	<p>Gambar Kegiatan Pelepasan dan Perpisahan siswa kelas XII</p>

	
<p>Gambar Kegiatan Field Trip</p>	<p>Gambar Kegiatan Karnaval dan PBB</p>

Dokumentasi SMA Negeri 1 Tempilang

	
<p>Gambar Foto Buku Peminatan</p>	<p>Gambar Masa Pengenalan Lingkungan sekolah Calon peserta didik baru T.P 2019-2020</p>

Dokumentasi SMA Negeri 1 Parittiga

- KEGIATAN EKSTRAKURIKULER (PRAMUKA)



- LOMBA CLASSMEETING



- KEGIATAN PENTAS SENI



Dokumentasi SMA Negeri 1 Simpang Teritip

	
<p>Gambar Kegiatan KPD Pramuka</p>	<p>Gambar Kegiatan Pembinaan Tertib berlalu lintas</p>

	
<p>Gambar Kegiatan Workshop Impementasi e-raport</p>	<p>Gambar Kegiatan Simulasi kelas XII</p>

Dokumentasi SMK Negeri 1 Kelapa

	
<p>Gambar Kegiatan Pramuka</p>	<p>Gambar Kegiatan Simulasi kelas XII</p>

	
<p>Gambar Kegiatan Pentas Seni</p>	<p>Gambar Kegiatan Kompetensi Siswa Multimedia</p>

Dokumentasi SMK Negeri 1 Parittiga

<p>KEGIATAN LKS</p> 	
<p>Gambar LKS</p>	<p>Gambar Uji Kompetensi Keahlian (UKK)</p>

	
<p>Gambar Kegiatan Pramuka</p>	<p>Gambar Kegiatan Prakerin</p>

Dokumentasi SMK Negeri 1 Simpang Teritip

	
<p>Gambar Kegiatan MOU Pramuka dengan Saka Wira Kartika (Dandim 0431)</p>	<p>Gambar Kegiatan Perkemahan Pengukuhan Penegak Ambalan SMKN 1 Simpang Teritip</p>

Dokumentasi SMK Negeri 1 Muntok

	
<p>Gambar Kegiatan Pramuka</p>	<p>Gambar Workshop Penilaian Kurikulum 2013 dengan e-raport</p>
	

Gambar Kegiatan Try Out Provinsi 1 Tanggal 21 Januari 2019 s.d 23 januari 2019	Gambar Kegiatan UNBK 2 Tanggal 04 Maret 2019 s.d 05 Maret 2019
---	---

Dokumentasi SMK Negeri 1 Tempilang



Gambar UNBK 2019	Gambar EBS Ganjil CBT dan Android
---------------------	--------------------------------------



Gambar Kegiatan Prakerin	Gambar Kegiatan Ujikom Nasional 2019
-----------------------------	---

H. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan

Dokumentasi SMA Negeri 1 Koba



Gambar	Gambar Kegiatan Pendidikan Karakter
--------	--

Pesantren Kilat SMA N 1 Koba

Siswa Baru



Gambar
Kegiatan HUT RI

Gambar
Kegiatan Kemah Blok

Dokumentasi SMA Negeri 1 Pangkalan Baru



Gambar
Pramuka

Dokumentasi SMK Negeri 1 Pangkalan Baru



Gambar
Kegiatan Masa Pengenalan
Lingkungan sekolah

Gambar
Kegiatan Rumah Belajar

Dokumentasi SMA Negeri 1 Pulau Besar



Gambar
Kegiatan Field Trip ke Hutan
Pelawan

Gambar
Kegiatan Pramuka

Dokumentasi SMK Negeri 1 Simpang Katis



Dokumentasi SMA Negeri 1 Toboali



Gambar
Kegiatan Peringatan Maulid Nabi

Dokumentasi SMA Negeri 1 Simpang Rimba



Dokumentasi SMA Negeri 1 Payung



Dokumentasi SLB Negeri Toboali



I. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur.

Dokumentasi SMK Negeri 1 Tanjung Pandan

	
<p>Gambar Kegiatan Ektrakurikuler Futsal</p>	<p>Gambar Kegiatan Ektrakurikuler Paskibraka</p>

Dokumentasi SMK Negeri 1 Badau

	
<p>Gambar Pramuka</p>	<p>Gambar Kegiatan Pelatihan siswa untuk mata pelajaran kreatif dan kewirausahaan</p>

Dokumentasi SMK Negeri 1 Simpang Pesak

	
---	--



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Gambar Pemeliharaan Gedung/R.Pramuka	Gambar Pemeliharaan UPS
--	----------------------------

Dokumentasi SMA Negeri 1 Sijuk

	
Gambar Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur	

Dokumentasi SMK Negeri 1 Kelapa Kampit

	
Gambar Field trip	Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur

III.2. Realisasi Anggaran

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki struktur anggaran belanja daerah dalam DPA 2019 yang terdiri dari 2 (dua) pos pengeluaran yaitu:

1. Belanja tidak langsung.
2. Belanja langsung.

Pos pengeluaran belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai.

Pos pengeluaran belanja langsung meliputi:

- a. Belanja pegawai untuk membayar upah dan honorarium pegawai,
- b. Belanja barang dan jasa untuk keperluan operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Belanja modal meliputi pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap dan tidak habis pakai.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 memperoleh anggaran sejumlah Rp 534.643.043.501,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 258.420.540.326,00 dan Belanja Langsung sejumlah Rp 276.222.503.175,00 untuk melaksanakan 10 program dan 206 kegiatan. Pada saat perubahan anggaran, terjadi penambahan anggaran, sehingga untuk Belanja Tidak Langsung menjadi Rp 288.902.309.020,40 dan pagu pada Belanja Langsung menjadi Rp 298.561.371.902,00. Total anggaran tahun 2019 menjadi sejumlah Rp 587.463.680.922,40. Adapun realisasi anggaran mencapai Rp 525.147.205.390 (89,39 persen) dengan sisa anggaran Rp 62.316.475.532,40 (10,61 persen).

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 89,39 persen dari total anggaran Belanja Langsung. Berdasarkan anggaran dan realisasi per sasaran maka anggaran terbesar adalah pada sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB. Adapun anggaran terkecil pada sasaran Peningkatan Relevansi pendidikan vokasi.

Dengan memperhatikan target dan realisasi kinerja maupun anggaran tahun 2019 berdasarkan sasaran strategis maka target dan realisasi kinerja maupun anggaran tahun berikutnya dapat lebih efektif dan produktif untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pendidikan khususnya dan Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 4.0
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Menengah (%)	85,77	87,11	101,56	14.506.740.000,00	14.030.371.657,00	97
	APK Pendidikan Khusus (%)	68,43	62,85	91,85			
Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	Persentase SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A (%)	44,03	43,38	98,52	258.475.059.827,00	210.752.710.816	81,5
Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi	Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP (orang)	200	367	183,5	200.000.000,00	200.000.000,00	100
Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BB	BB	100	25.379.572.075,00	22.915.715.626,00	90,29
					298.561.371.902,00	247.898.798.099	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Perencanaan Kinerja (Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja) tahun 2019 dan diikuti pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan atas penggunaan anggaran tahun 2019 yang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja.

Dari capaian kinerja sasaran strategis diketahui bahwa predikat kinerja Dinas Pendidikan adalah sangat tinggi. Pada sasaran strategis Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus terdapat 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja APK Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus diperoleh realisasi yang sudah diatas target yang ditetapkan dengan capaian realisasinya adalah sangat tinggi yaitu 101,56% dan 124,71%. Untuk sasaran Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP dapat direalisasikan diatas target, dan capaian kinerja sasaran ini adalah Sangat Tinggi yaitu 183,5%. Pada sasaran strategis Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB, realisasi indikator % SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A masih dibawah target akan tetapi capaian predikat adalah Sangat Tinggi yaitu 98,52%. Untuk sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator dapat direalisasikan sesuai target yaitu BB. Dengan demikian capaian kinerja sasaran ini adalah Sangat Tinggi.

Sebagaimana halnya siklus sistem akuntabilitas kinerja, maka laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja untuk penyusunan rencana kinerja selanjutnya.



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam, Telp./Fax (0717) 434991 - Pangkalpinang



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum	2
I.3. Struktur Organisasi	5
I.4. Tugas dan Fungsi	6
I.5. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana	11
1.5.1. Sumber Daya manusia (SDM)	11
1.5.2. Sarana dan Prasarana	13
I.6. Sumber Pendanaan Tahun 2019	14
I.7. Isu Strategis Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
II.1. Perencanaan Strategis	17
II.1.1. Visi dan Misi	17
II.1.2. Tujuan dan Sasaran	21
II.1.3. Strategi dan Kebijakan	22
II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan	25
II.2. Perjanjian Kinerja	27
II.3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	29



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
III.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	31
III.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 2019	33
III.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018	34
III.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	35
III.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standard nasional	37
III.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	37
III.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	38
III.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	39
III.1.8. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019	42
III.2. Realisasi Anggaran	107
BAB IV PENUTUP	109
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12
Tabel 1.2. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan pada setiap Jenjang di UPTD Satuan Pendidikan	12
Tabel 1.3. Jumlah SMA, SMK dan SLB	14
Tabel 1.4. Alokasi Belanja per Program Dinas Pendidikan Tahun 2019	14
Tabel 1.5. Alokasi APBD dan APBN pada Dinas Pendidikan Tahun 2019	15
Tabel 2.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan	21
Tabel 2.2. Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	23
Tabel 2.3. Program dan Jumlah Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022	26
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.....	27
Tabel 2.6. Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	28
Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2019 (Anggaran Setelah Perubahan APBD)	29
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	32



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	33
Tabel 3.3.	Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2019	34
Tabel 3.4.	Capaian kinerja Akhir Renstra per Tahun 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi APK SMA/Sederajat antara Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	37
Tabel 3.6.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi atas Pencapaian Kinerja Tahun 2019	37
Tabel 3.7.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja	38
Tabel 3.8.	Pemetaan Program/Kegiatan Sesuai Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2019	39
Tabel 3.9.	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019	42
Tabel 4.0	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Strategis	108



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja pada tahun 2019. Berdasarkan data dan analisa terhadap realisasi dan capaian kinerja sasaran-sasaran tersebut diketahui bahwa predikat capaian kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2019 adalah sangat tinggi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA	ANALISIS
APK Pendidikan Menengah (%)	85,77	87,11	101,56	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung semua pemangku kepentingan dalam dunia Pendidikan, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha dan masyarakat. Semua elemen menunjukkan komitmen dan kontribusi positif dalam pencapaian realisasi sasaran ini.
APK Pendidikan Khusus (%)	68,43	85,34	124,71	Sangat Tinggi	
Persentase SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A (%)	44,03	43,38	98,52	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini sangat didukung oleh penerahan sumberdaya, dimana semua program di Dinas Pendidikan berkontribusi dalam peningkatan mutu SMA, SMK dan SLB yang ditandai dengan perolehan akreditasi A.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI
Jumlah Lulusan SMK yang disertifikasi oleh BNSP (orang)	200	367	183,5	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung komitmen pimpinan dan sumberdaya terutama anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BB	BB	100	Sangat Tinggi	Keberhasilan indikator ini didukung komitmen pimpinan.

Sebagaimana halnya siklus sistem akuntabilitas kinerja, maka laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja untuk penyusunan rencana kinerja berikutnya. Dengan demikian maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. Penyusunan laporan ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja menjabarkan rencana kinerja tahunan, pengukuran kinerja dan uraian analisis capaian kinerja beserta akuntabilitas keuangan guna menyajikan informasi atas upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kiranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan kinerja selanjutnya sehingga terbentuk sistem akuntabilitas kinerja yang utuh dan berkesinambungan.

Pangkalpinang, Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640302 198903 1 008**